



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zulfa Mustaghfiroh ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Muh. Sholihuddin, M.HI.
NIP. 197707252008011009

Sekretaris,

Muh. Sholihuddin, M.HI.
NIP. 197707252008011009

Penguji I,

Drs. Suwito, M.Ag.
NIP. 195405251985031001

Penguji II,

Nurul Asiyah Nadhifah, M.HI.
NIP. 197504232003122001

Pembimbing,

Drs. Ach. Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Surabaya, 18 Agustus 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
Nip. 195005201982031002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulfa Mustaghfiroh

Nim : C51207058

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah/skripsi yang berjudul : Implementasi Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Kebolchan Suami Mewakillan Qabul Dalam Akad Nikah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institute manapun, serta bukan karya plagiat/jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademis jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.



ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ketentuan Kebolehan Suami Mewakikan Kabul Dalam Akad Nikah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)” adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimanakah prosedur pernikahan yang dilaksanakan dengan cara suami mewakili kabul dalam akad nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Wungu Kabupaten Madiun? Dan bagaimanakah implementasi Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam tentang ketentuan kebolehan suami mewakili kabul dalam akad nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Wungu Kabupaten Madiun?

Data penelitian yang dihimpun melalui dokumenter, interview dan telaah pustaka menunjukkan pelaksanaan *tawki' az-zauj* dalam akad nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Wungu selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan *tawkil az-za'uj* dalam akad nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Wungu pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat yang ada. Oleh karenanya pernikahannya dapat dicatat oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Wungu sebagai pernikahan yang sah. Prosedur pelaksanaannya sebagaimana ketentuan pencatatan pernikahan secara administratif. Adapun perbedaannya dalam pembuatan surat kuasa oleh calon suami bahwa akad nikah yang diucapkan wakil adalah untuknya, ucapan kabul yang dilafazkan wakil suami dan penandatanganan taklik talak diserahkan kepada suami.

Kompilasi Hukum Islam di Kantor Urusan Agama berkedudukan sebagai pedoman atau landasan dalam hal ketentuan hukum Islam. Adapun peraturan di bawahnya seperti Peraturan Menteri Agama merupakan pedoman atau landasan Kantor Urusan Agama dalam hal ketentuan pelaksanaan tugas dan kewajiban KUA. Kantor Urusan Agama melaksanakan *tawki'l az-zauj* dalam akad nikah pada tahun 2000 berdasarkan Pasal 24 PMA nomor 2 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Menteri Agama Republik Indonesia. Dengan demikian pasal 29 Kompilasi Hukum Islam telah di implementasikan dalam pelaksanaan *tawki'l az-zauj* dalam akad nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Wungu.

Pernikahan yang dilaksanakan dengan cara suami mewakili kabul dalam akad nikah hendaknya dilaksanakan dengan hati-hati. Yaitu dalam hal prosedur pelaksanaannya seperti pembuatan surat kuasa, pengucapan kabul oleh wakil dari suami serta penandatanganan taklik talak. Hal ini dikarenakan ketentuannya tidak biasa khususnya dalam hal pengucapan kabul akad nikah oleh wakil dari suami. Sehingga tidak menimbulkan kekeliruan hukum yang mengakibatkan pernikahan sah bagi wakil dari suami dan mengurangi makna sakralnya akad nikah.

DAFTAR TRANSKRIPSI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dan transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambing huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons	Nama	Kons	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	s	Es (dengan titih di bawah)
ض	Dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (2010), Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 17

Ikatan lahir batin dalam definisi ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak boleh semata berupa ikatan lahiriah saja hidup bersama dalam ikatan formal, akan tetapi keduanya harus membina ikatan batin. Ikatan lahir mudah sekali terlepas jika tidak diikuti oleh ikatan batin. Ikatan lahir dan batin lah yang menjadi fondasi yang kokoh dalam membangun dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.⁶

¹⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 2 (Beirut: Dar al-Fath, 2006), 467

Pada tahun 2000 KUA kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, menikahkan Siti Masfufah dan Agus Kholiq. Pernikahan ini dilaksanakan dengan cara suami mewakili kabul dalam akad nikah. Yaitu dari Agus Kholiq kepada saudara laki-laknya Faifsan Taufiq. Pelaksanaan pernikahan dengan cara suami mewakili kabul dalam akad nikah jarang sekali terjadi di masyarakat, oleh karenanya permasalahan ini menarik perhatian penulis untuk membahasnya.

Melalui judul ini penulis ingin mengetahui bagaimana pernikahan yang dilaksanakan dengan cara suami mewakili kabul dalam akad nikah di KUA kecamatan Wungu. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan

²³ *Ibid.*

mengetahui pendapat kepala KUA bagaimana pelaksanaan pernikahan yang dilaksanakan dengan cara suami mewakili kabul dalam akad nikah di wilayah kerjanya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka identifikasi masalah yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut:

1. Akad nikah berupa *ṣīgat* ijab kabul merupakan salah satu dari syarat sah nikah.
2. *Ṣīgat* kabul adalah pernyataan pihak kedua yaitu suami untuk menyatakan kerelaan.
3. Dalam hal-hal tertentu suami boleh mewakilkan kabul dalam akad nikah menurut hukum Islam. Baik menurut pendapat para imam mazhab, pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama.
4. Alasan pernikahan dilaksanakan dengan cara suami mewakilkan kabul dalam akad nikah.
5. Syarat orang yang mewakili kabul dalam akad nikah.
6. Kasus pernikahan yang dilaksanakan dengan cara suami mewakilkan kabul dalam akad nikah di KUA kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.
7. Ketentuan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam tentang ketentuan kebolehan suami mewakilkan kabul dalam akad nikah.

Kompilasi Hukum Islam tentang kabul nikah yang diwakilkan. Dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap kabul nikah yang diwakilkan tersebut.²⁵

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hal di bawah ini:

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum khususnya yang berhubungan dengan implementasi pasal 29 Kompilasi Hukum Islam mengenai pernikahan yang dilaksanakan dengan cara suami mewakili kabul dalam akad nikah. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Syariah apabila ada masalah yang berkaitan dengan pernikahan yang dilaksanakan dengan cara suami mewakili kabul dalam akad nikah.
2. Secara Praktis dapat digunakan sebagai pedoman atau pertimbangan bagi instansi atau orang yang berkepentingan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan *tawkīl az-zauj* dalam akad nikah. Misalnya KUA yang menangani pelaksanaan *tawkīl az-zauj* dalam akad nikah atau Pengadilan Agama yang menangani permasalahan yang disebabkan *tawkīl az-zauj* dalam akad nikah.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya pemahaman yang menyimpang terhadap skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan yang dapat dipahami tentang beberapa istilah berikut ini:

I. Sistematika Pembahasan

Adapun Bab II merupakan landasan teori yang membahas tentang pengertian akad nikah dan *tawkīl az-za'uj* dalam akad nikah. Akad nikah dibahas dalam tiga pembahasan, yaitu pengertian akad nikah, syarat dan rukun akad nikah, cara melaksanakan akad nikah. Adapun *tawkīl az-za'uj* dalam akad nikah pembahasannya dibagi menjadi dua. Ketentuan hukum tentang *tawkīl az-za'uj* dalam akad nikah menurut *fuqaha'* dan menurut pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. Pembahasan mengenai ketentuan hukum tentang *tawkīl az-za'uj* dalam akad nikah menurut *fuqaha'* dibagi menjadi empat bagian, yaitu pengertian *tawkīl az-za'uj* dalam akad nikah, rukun dan syarat *tawkīl az-za'uj* dalam akad nikah serta tata cara *tawkīl az-za'uj* dalam akad nikah dan *ṣīgat* ijab kabulnya serta alasan *tawkīl az-za'uj* dalam akad nikah.

Bab III tentang hasil penelitian berisi gambaran umum KUA kecamatan Wungu. Selanjutnya dipaparkan mengenai latar belakang terjadinya *tawki' az-zauj* dalam akad nikah di KUA kecamatan Wungu serta teknis dan dasar hukum pelaksanaan *tawki' az-zauj* dalam akad nikah di KUA kecamatan Wungu.

Bab IV tentang analisis pelaksanaan *tawki' az-zauj* dalam akad nikah di KUA kecamatan Wungu dan analisis terhadap implementasi pasal 29 Kompilasi Hukum Islam tentang ketentuan suami mewakilkan kabul dalam akad nikah di KUA kecamatan Wungu.

Adapun bab V merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

AKAD NIKAH DAN *TAWKĪL* AZ-ZAUJ DALAM AKAD NIKAH

A. Akad Nikah

1. Pengertian Akad Nikah

Akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan atau *al-ittifaq*.¹ Adapun akad menurut bahasa

الرَّيْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ، سَوَاءٌ أَكَانَ رَيْطاً حَسِياً أَمْ مَعْنَوِيّاً، مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ، أَمْ مِنْ جَانِبَيْنِ
Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun maknawi dari satu
segi maupun dari dua segi.²

Akad atau perikatan terjadi ketika dua orang yang mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan dinyatakan dalam kata-kata atau sesuatu yang bisa dipahami. Maka terjadilah peristiwa hukum yang disebut akad atau perikatan.³

Adapun pengertian akad nikah secara singkat adalah ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan pertama oleh pihak pertama menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan bersama suami istri. Dan pernyataan selanjutnya oleh pihak kedua yang mengadakan akad untuk menyatakan rasa rida disebut kabul. Selanjutnya kedua pernyataan tersebut disebut akad nikah.⁴

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 97

² Wabbah az-Zuhailiy, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 4, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 2917

³ Ahmad Kuzari. *Nikah Sebagai Perikatan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 19995), 1

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 467

⁷ İbrāhīm bin Muḥammad bin Salīm Ibnu Ḍauyān, *Manār as-Sabīl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, tt), 96.

adalah akad yang dilangsungkan oleh pihak berakad yang tidak hadir atau tidak mampu mengucapkan lafaz ijab dan kabul dengan mengirimkan surat yang berisi ijab atau kabul ke tempat upacara akad untuk dibacakan kembali dihadapkan pihak yang hadir dan dua orang saksi. Akan tetapi akad tidak sah bagi yang hadir dan mampu mengucapkan akad.¹⁵

Seseorang yang mewakilkan urusannya kepada orang lain ini dalam fiqh muamalah dikenal dengan akad *wakālah*. Adapun kata *Wakālah* secara bahasa berarti perlindungan (*al-hifẓ*) dan pendelegasian (*at-tafwīḍ*).²⁰ Adapun pengertian *wakālah* menurut istilah, para ulama merumuskan dengan redaksi yang amat bervariasi. Sayyid Sābiq mengatakan bahwa *wakālah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.²¹

Senada dengan rumusan tersebut, ulama Malikiyah berpendapat bahwa *wakālah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati.²²

Dengan istilah lain, kelompok Hanāfiyyah merumuskan bahwa *wakālah* itu berarti seseorang mempercayakan orang lain menjadi ganti dirinya untuk *bertaṣarruf* pada bidang-bidang tertentu yang boleh diwakilkan.²³

Ulama Syāfi'iyyah mengatakan bahwa *wakālah* adalah suatu ungkapan yang mengandung maksud pendelegasian sesuatu oleh seseorang

²⁰ Wahbah az-Zuhailiy, juz 5, 4055

²¹ Sayyid Sābiq, juz 3, 895

²² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 21

²³ 'Abd ar-Rahman al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 129

kepada orang lain supaya orang lain tersebut melaksanakan apa yang dikuasakan atas nama pemberi kuasa.²⁴

b. Rukun dan Syarat *Tawki'l az-zauj* dalam Akad Nikah

Wakālah secara umum memberikan rukun dan syarat *wakālah* adalah sebagai berikut:

- Adapun secara terperinci pembahasan mengenai syarat dan rukun *tawkīl az-zauj* dalam akad nikah adalah sebagai berikut. Mengenai orang yang mewakilkan pembahasannya dirumuskan dalam beberapa kitab literatur dengan berbagai sudut pandang. Hal ini dikarenakan perbedaan yang dimaksud dengan *takwīl az-zauj* dalam akad nikah. Pelaksanaan *wakālah* yang ada dalam pernikahan secara keseluruhan dapat dilaksanakan oleh pihak calon suami, calon istri, dan wali dari pihak calon istri.

diminta menjadi wakil untuk menikahkan *muwakkil* dengan perempuan yang telah ditentukan.³⁴

Adapun jika diminta mewakili kabul dalam akad nikah dengan perempuan yang belum diketahui, wakil harus memilih perempuan tersebut. Apakah tiga syarat di atas sudah mencukupi, atau masih perlu ditambah syarat wakil tersebut harus pandai. Ada tiga pendapat:

- 1) Pendapat pertama: Hendaknya wakil adalah orang yang pandai yang dapat menerima kabul nikah bagi dirinya sendiri. Jika dia adalah orang yang bodoh maka tidak boleh. Hal ini karena terbatasnya haknya dalam nikahnya sendiri.
- 2) Pendapat kedua: Tidak harus wakil orang yang pandai, karena dia telah diizinkan untuk menerima kabul, dan dia sah menerima kabul nikahnya sendiri atas izin dari walinya.
- 3) Pendapat ketiga: Jika wakil tersebut telah ditunjukkan kabilah perempuan yang akan diterima kabul akad nikahnya, meski tidak ditunjukkan perempuannya langsung, maka diperbolehkan wakil tersebut orang yang bodoh. Namun jika tidak ditunjukkan *qabīlah* dan perempuannya sama sekali, maka wakil tersebut tidak boleh orang yang bodoh. Wakil harus orang yang pandai karena terdapat ikhtilaf dalam

³⁴ Abi al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Māwardī al-Busayrī, *Al-Ḥāwī al-Kabīr*, Juz 9, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2009), 115

hal izin dari walinya untuknya akad bagi dirinya sendiri atas suatu perkara yang belum jelas.³⁵

Mazhab Malikiyah memperbolehkan untuk mewakilkan kepada orang yang dilarang menjadi wali selain orang yang haji dan umrah serta orang idiot. Maka boleh mewakilkan akad nikah kepada orang Nasrani, budak, perempuan, anak kecil yang sudah *mumayyiz*.

Mewakilkan atau memberi kuasa dalam akad nikah tidak sama dengan mewakilkan atau pemberian kuasa dalam akad-akad lainnya. Seorang wakil atau kuasa dalam akad tidak lain hanyalah seorang perantara serta penyampai pesan dari orang yang mewakilkan. Hak dan kewajiban yang ditimbulkan sebagai akibat hukum dari akad yang dilaksanakan oleh seorang wakil tidak menjadi tanggungan seorang wakil tersebut, akan tetapi hak dan kewajiban tersebut kembali kepada orang yang mewakilkan.³⁶

Hak akad adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk menjalankan akad seperti serah terima. Para Ulama sepakat bahwa hak akad dalam mewakilkan akad nikah kembali pada *muwakkil*. Adapun wakil semata hanya sebagai perantara yang membantu *muwakkil*, maka hak akad tidak kembali pada wakil.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ 'Ala' ad-Dīn Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kāsani al-Ḥanafī, *Badā'ī' Shanā'ī' fī at-Tartīb asy-Syarā'ī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 32

Oleh karena itu, istri menjadi hak penuh suami, suami dituntut untuk memberikan mahar bagi istrinya, dan istri berhak menerima mahar tersebut bukan wakil. Kecuali jika istri memberikan izin secara jelas, maka wakil dapat menerima mahar. Jika Ayah atau kakek bermaksud menerima mahar dan istri tidak menuntut kepada suami lagi, maka diamnya istri menurut mazhab Hanafiyyah menunjukkan izin untuk ayah atau kakek untuk menerima mahar.³⁸

³⁷ Wahbah az-Zuhailiy, 6731

³⁸ *Ibid.*, 6723.

³⁹ *Ibid.*

kecuali jika itu demi kebaikan *muwakkil*,⁴² akan tetapi yang demikian kelanjutan akad tergantung persetujuan *muwakkil*.

Apabila *muwakkil* juga menentukan batasan kelanjutan akad juga dan wakil melanggar batasan tersebut maka menurut mazhab Hanafiyyah dan Mālikiyyah kelanjutan akad tergantung pada persetujuan *muwakkil*, meskipun jika *muwakkil* telah *dukhūl* dengan perempuan yang dinikahinya tanpa mengetahui wakil melebihi batas kewenangannya, *muwakkil* tetap memiliki hak untuk melanjutkan atau tidak akad yang dilaksanakan wakil.⁴³

Jika *muwakkil* membatasi perempuan yang ingin dinikahinya dengan nama atau nama orang tuanya, jika wakil menikahkan *muwakkil* sesuai dengan batasan tersebut maka akad dianggap terlaksana, jika wakil menikahkan dengan perempuan yang tidak sesuai dengan batasannya maka wakil dinilai telah menyalahi batasan tersebut.⁴⁴

Adapun kelanjutan akadnya tergantung persetujuan *muwakkil*, jika *muwakkil* setuju maka akad terlaksana, jika *muwakkil* tidak setuju maka batal. Jika seorang wakil menyalahi batasan maka ia dinilai bukan orang yang berwenang atas akad, dan orang yang demikian menurut mazhab

⁴² Sayyid Sābiq, 525

⁴³ Wahbah az-Zuhailiy, 6728

⁴⁴ *Ibid.*

bahwa pasangan hendaknya sekufu dan dengan mahar *miṣil*, sebagaimana yang diketahui bahwa hal tersebut dibatasi oleh syarat. Jika wakil menikahkan *muwakkil* dengan perempuan sekufu tanpa cacat dan dengan mahar yang tidak direkayasa maka akad lanjut bagi *muwakkil*.⁴⁷

Jika wakil menikahkannya dengan perempuan yang buta, atau terpotong dua tangannya, atau lumpuh separuh badannya, atau gila atau yang compang-camping pakaiannya, atau dengan mahar yang direkayasa, maka kelanjutan akad tergantung pada persetujuan *muwakkil* menurut pendapat Abu Yusuf, Muḥammad dan Mālikiyyah. Karena perbedaan terminologi perwakilan yang berkembang dalam masyarakat.⁴⁸

Abu Yusuf dan Muḥammad beralasan bahwa orang mengangkat orang lain menjadi wakil untuk dimintai pertolongan demi kebbaikannya. Oleh karenanya meski tidak disebutkan batasan hukum, tidak lantas boleh menikahkan dengan sembarang perempuan. Karena secara umum hendaknya wakil memilih perempuan yang sekufu dan dengan mahar *miṣl*.⁴⁹

d. Tata Cara *Tawkīl az-Zauj* dalam Akad Nikah dan *Ṣīgat* Ijab Kabulnya.

Terdapat tiga cara *tawkīl az-zauj* dalam akad nikah, yaitu:

- 1) Wali dari pihak calon mempelai perempuan mewakilkan kepada orang lain

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Muḥammad bin ‘Alī asy-Syawkaniy, *Faṭḥ al Qadir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah,tt)

⁴⁹ Sayyid Sābiq, 525

⁵² Wahbah az-Zuhailiy, 6732

dasar misalnya wali atas hak milik, atau hak yang diberikan seperti *wakalāh*.⁵³

Akad yang demikian dapat dilaksanakan jika pihak yang bertindak dalam akad seperti di bawah ini:

- a) Jika akad ada kaitannya dengan dirinya sendiri dan ia berkedudukan juga menjadi wali maka seorang anak paman boleh menikahi sendiri anak perempuan pamannya, karena wakil dalam pernikahan sebagai perantara dan tidak dituntut atas hak akad.
- b) Jika *'āqid* bertindak sebagai dirinya sendiri dan sebagai wakil bagi pihak lain misalnya jika seorang perempuan mewakilkan kepada wakil untuk menikahnya sendiri, maka wakil tersebut berkata di depan saksi, fulānah binti fulān telah mewakilkan kepadaku sendiri untuk menikahnya, maka saksikanlah bahwa aku akan menikahnya
- c) Jika wakil adalah wali bagi kedua pihak misalnya jika kakek menikahkan cucu perempuan dari anak laki-laknya dengan cucu laki-laki dari anak laki-laknya yang lain, dan seperti jika dia menikahkan anak perempuannya yang kecil dengan anak laki-laki adik laki-laknya yang berada dalam tanggungannya..
- d) Jika wakil adalah wakil dari dua belah pihak misalnya jika seorang perempuan dan seorang laki-laki mewakilkan nikahnya pada

⁵³ 'Ala' ad Din Abi Bakar bin Mas'ūd al-Ka'sani al-Hanafi, 49

seorang, maka wakil tersebut berkata: Saya nikahkan fulānah dengan fulān

- e) Jika seorang menjadi wali dari salah satu pihak dan menjadi wakil dari pihak lain misalnya jika seorang laki-laki mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan putri kecilnya, dan wakil tersebut menikahnya sendiri.⁵⁴

Adapun menurut mazhab Syafi'i akad hanya dapat dilaksanakan oleh satu pihak terbatas sebagaimana dalam contoh nomor tiga dengan alasan *ḍarurat*.⁵⁵ Contoh *ṣigat*nya adalah saksikanlah bahwa aku telah menikahkan fulānah baginya. *اشهدوا أني قد زوجها منه*

3) Calon suami mewakilkan kabul kepada orang lain

Pelaksanaan akad nikah dalam macam tata cara ini dilaksanakan dengan cara calon suami mewakilkan akad nikah kepada orang lain. Sedangkan wali bertindak sendiri dalam hal menikahkan anak perempuannya. Contoh *ṣigat* ijabnya adalah *زوجت بنتي* saya nikahkan anak perempuan saya. Adapun *ṣigat* kabul dari wakil suami adalah saya terima nikahnya bagi fulān (*قبلت نكاحها له*). Apabila wali mewakilkan

⁵⁴ Wahbah az-Zuhailiy, 6733

⁵⁵ 'Ala' ad-Din Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kāsani al-Ḥanafī, 49

e. Alasan Mewakilkan Kabul dalam Akad Nikah

Oleh karenanya tidak ada ketentuan syarat yang menyebabkan diperbolehkannya mewakili kabul dalam akad nikah. Selama suami berhalangan hadir dalam akad nikah dengan alasan apapun, dia boleh mewakilkannya kepada orang lain.

2. Ketentuan Hukum tentang Suami Mewakilkkan Kabul dalam Akad Nikah Menurut Pasal 29 KHI

⁵⁶ Abi Yahya Zakariyya al-Anṣariy asy-Syafi'i, *Asna al-Maṭālib syarah Rauḍah at Ṭālib*, Juz 6, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 2001), 333.

⁵⁷Abi Bakr 'Uşman bin Muḥammad Syaṭṭā al-Dimyāṭi al-Bakr, *I'anah at-Ṭalibin*, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿAlamiyyah, 1995), 543.

Istilah “dalam hal-hal tertentu” dalam pasal ini masih demikian umum dan multitafsir. Namun di sisi lain terdapat segi positif bahwa dengan ini membuka wacana untuk di jadikan bahan diskusi.

**PELAKSANAAN *TAWKĪL AZ ZA'UJ* DALAM AKAD NIKAH DI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WUNGU**

KUA adalah Instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.¹

Tugas KUA diatur dalam Pasal 2, yaitu : “KUA mempunyai tugas menyelesaikan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan”. Fungsi KUA diatur dalam Pasal 3, yaitu : “Dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud dalam Pasal 2, KUA kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

² *Ibid.* 418.

- ⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Pasal 1 ayat 1 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara N0 20 Tahun 2005 hal 304

B. Latar Belakang Terjadinya *Tawki'l az zauj* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu

Siti Masfufah binti alm Moh. Suhud menikah dengan Maskor bin Kusran pada tanggal 5 Desember 1990. Pernikahan ini diawali oleh pengenalan keduanya ketika Siti Masfufah pertama kalinya naik kapal terbang untuk pergi merantau menjadi tenaga kerja wanita ke Arab Saudi. Pengalaman pertama naik kapal terbang, membuatnya tegang dan ketakutan. Bantuan dari Maskor ketika menemaninya ke kamar mandi dalam pesawat memberikan kesan yang mengantarkan kebersamaan mereka ke jenjang yang lebih dekat.

Namun pernikahan mereka tidak berjalan sesuai dengan harapan. Tidak sampai setengah tahun membina rumah tangga, kebutuhan ekonomi memaksa Siti Masfufah kembali mengadu nasib ke Arab Saudi. Jarak jauh harus mereka jalani demi kelangsungan kehidupan mereka. Namun di sisi lain, jarak jauh ini justru tidak semakin mendekatkan keduanya, melainkan menjadi salah satu penyebab perpisahan.

Maskor yang memilih tidak meneruskan pengalamannya di Arab Saudi memilih tetap tinggal dan bekerja di Blitar, terpikat saudara sepupu Siti Masfufah. Maskor menikah dengan saudara sepupu Siti Masfufah tanpa menjatuhkan talak secara resmi di pengadilan agama. Siti Masfufah tidak menggubris keadaan itu dan tetap meneruskan kehidupannya di Arab Saudi hingga bertemu dengan Agus Kholiq.

Pertengahan tahun 2000 Siti Masfufah dan Agus Kholiq sepakat meresmikan kedekatan mereka dengan pernikahan. Siti Masfufah dengan statusnya yang tidak pernah bertemu dan tidak dinafkahi baik lahir maupun batin oleh Maskor selama bertahun-tahun, memutuskan melakukan akad nikah dengan Agus Kholiq. Akad nikah ini terlaksana atas pertolongan majikannya di Arab Saudi. Kemudian mereka kembali ke Indonesia bersama untuk meresmikan pernikahannya di KUA.

Keinginan keduanya meresmikan pernikahan di KUA terkendala status Siti Masfufah yang belum memiliki akta cerai resmi dari Maskor. Di tengah terbatasnya waktu cuti kerja, mereka mendatangi Maskor meminta kesediaannya membantu mereka agar hadir di persidangan atas perkara cerai gugat yang dilayangkan oleh Siti Masfufah. Kala itu keduanya mendapati bahwa Maskor telah bercerai dengan sepupu Siti Masfufah dan menikah dengan orang lain dengan di karuniai satu orang anak dan istri ketiganya yang tengah mengandung.

Maskor yang kehadirannya menentukan diterbitkannya akta cerai sebagai syarat nikah Siti Masfufah dan Agus Kholiq, mangkir untuk hadir. Sehingga menyebabkan mundurnya masa idah yang diperkirakan beberapa hari sebelum hari resepsi pernikahan Siti Masfufah dan Agus Kholiq.

Ketidakhadiran Maskor menyebabkan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Siti Masfufah di putus verstek pada tanggal 26 Juni 2000. Perkara cerai gugat dengan nomor 259/Pdt.G/2000/PA.Kab.Mn ini dibuktikan lewat akta cerai

Menunda keberangkatan Agus Kholiq hingga sekurang-kurangnya tanggal 26 September mustahil dilakukan. Karena dengan demikian mereka harus mengundur tanggal pelaksanaan resepsi yang telah dipersiapkan mulai undangan, dekorasi pelaminan dan lain sebagainya. Selain itu, menunda pemberangkatan berarti harus mengurus perpanjangan visa dan melebihi masa cuti kerja. Hal ini bisa menyebabkan Agus Kholiq kehilangan pekerjaannya dan memberikan kerugian secara materiil yang jumlahnya tidak sedikit.

Setelah solusi tersebut mendapat persetujuan dari pegawai pembantu pencatat nikah dan Kepala KUA kecamatan Wungu, maka resepsi pernikahan digelar sebagaimana yang telah direncanakan. Pernikahan dengan cara mengakhirkan akad nikah setelah resepsi ini tidak diketahui oleh masyarakat secara umum.

Setelah resepsi selesai digelar keesokan harinya Agus Khoлиq berangkat untuk kembali bekerja di Arab Saudi setelah sebelumnya membuat surat kuasa untuk memenuhi persyaratan tambahan bagi pelaksanaan *tawkīl zauj* bagi akad nikah. Adapun wakil yang ditunjuk adalah Faifsan Taufiq yaitu adik kandung dari Agus Khoлиq. Berdasarkan kartu keluarga No. 474.5/286/06.2015/0649/1991

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung, Faifsan Taufiq adalah anak ke lima dari enam bersaudara pasangan Mukti Wibowo dan Sayekti. Sekaligus adik ke empat dari Agus Kholiq.⁷

C. Teknis dan Dasar Hukum Pelaksanaan *Tawkil az zauj* dalam Akad Nikah di KUA Kecamatan Wungu

Pelaksanaan *tawki'l az-zauj* di KUA kecamatan Wungu merupakan kasus yang baru terjadi satu kali dalam kurun waktu mulai berdirinya instansi tersebut hingga saat ini. Adapun kasusnya sebagaimana tersebut di atas antara Agus Kholiq yang mewakili kabul dalam akad nikah kepada Faifsan Taufiq dalam pernikahannya dengan Siti Masfufah.

Prosedur pelaksanaannya sebagaimana ketentuan pencatatan pernikahan secara administratif. Adapun perbedaannya dalam pembuatan surat kuasa oleh calon suami bahwa akad nikah yang diucapkan wakil adalah untuknya, ucapan kabul yang dilafazkan wakil suami dan penandatanganan taklik talak diserahkan kepada suami.

Tawkiil az zauj tersebut dilaksanakan pada tahun 2000. Adapun dasar pelaksanaannya adalah Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 23 Peraturan Menteri Agama nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.

⁷ Siti Masfufah, *wawancara*, Madiun, tanggal 16 Juni 2011

Berdasarkan Pasal 23 ayat 3 Peraturan Menteri Agama nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, “Wakil dari suami harus dikuatkan dengan surat kuasa yang disahkan oleh PPN atau Pembantu PPN yang dahulu memeriksa atau oleh kepala Perwakilan Republik Indonesia setempat apabila calon suami atau wali nikah berada di luar negeri”.

Pernikahan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 September 2000 jam 09:00 WIB di KUA Madiun. Sesuai dengan yang diterangkan dalam surat kuasa dan daftar pemeriksaan nikah nomor 229/06/2000. Pada hari tersebut dari pihak

mempelai wanita Siti Masfufah didampingi oleh wali nikahnya yaitu Imam Sarbini sekaligus kakak kandungnya datang ke KUA. Adapun dari pihak mempelai laki-laki diwakili oleh Faifsan Taufik.

Akad nikah tersebut dipimpin oleh Tasrifan yang menjabat sebagai kepala KUA Wungu dan dihadiri oleh dua orang saksi. Saksi pertama yaitu Samidi pembantu pegawai pencatat nikah desa Mojopurno. Saksi kedua adalah Suyani Mukhlis yang juga bertindak sebagai saksi pelaksanaan *tawkil*.

Tasrifan sebagai penghulu terlebih dahulu menerima *tawki* wali dari Imam Sarbini. Kemudian dilanjutkan pengucapan ijab kabul dengan Faifsan Taufiq. Ijab kabul dilaksanakan menggunakan bahasa Indonesia. Adapun *šigat* ijab yang digunakan adalah “Saya nikah dan kawinkan Siti Masfufah binti Moh. Suhud dengan Agus Kholiq bin Mukti Wibowo dengan mas kawin lima puluh ribu rupiah”.

Adapun *ṣīgat* kabul dari wakil suami adalah “Saya terima nikah dan kawinnya Siti Masfufah binti Moh. Suhud bagi saudara laki-laki saya Agus Kholiq dengan mas kawin lima puluh ribu rupiah di bayar tunai”. Dalam ijab kabul tersebut telah terlihat bahwa Faifsan Taufiq menyebutkan secara tegas bahwa kabul akad nikah yang diucapkannya adalah untuk saudara laki-lakinya.⁸ Hal ini sebagaimana keterangan Kusnudin Ketua KUA Kebonsari yang pada

⁸ Kusnudin, Ketua Kantor Urusan Agama Kebonsari, *wawancara*, Madiun, tanggal 15 Juli 2011

Setelah ijab kabul selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan penandatanganan akta nikah. Karena pada hari tersebut yang hadir adalah wakil dari suami, maka yang menandatangani adalah wakil dari suami tersebut. Dalam lembaran akta nikah model N tersebut dengan jelas ditulis dalam bagian X bahwa:

Nama : Faifsan Taufiq
Umur : 23 tahun
Warga negara : WNI
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Tulungagung
Tanggal surat kuasa : 11 September 2000

Pasal 24 ayat 2 Peraturan Menteri Agama nomor 2 Tahun 1990 Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah menyebutkan bahwa: Apabila waktu akad nikah suami mewakili kabul kepada orang lain, maka taklik talak itu dibaca dan

ditandatangani oleh suami pada waktu lain di muka PPN atau Pembantu PPN tempat akad nikah dilakukan atau yang mewilayahi tempat tinggalnya.⁹

Ahmad Zainuri Ketua KUA Kecamatan Wungu menuturkan bahwa pelaksanaan *tawki'l az zauj* dalam akad nikah diperbolehkan oleh hukum Islam, baik menurut pendapat para *fukaha'* maupun undang-undang dan peraturan yang mengatur pernikahan di Indonesia. Namun kebolehan ini kurang dipahami masyarakat secara umum. Karena menjadi suatu hal yang jarang sekali terjadi jika dalam sebuah akad pernikahan suami tidak hadir dan kabulnya diwakilkan kepada orang lain.

Pelaksanaan *tawki'l az zauj* dalam akad nikah di KUA kecamatan Wungu juga demikian adanya. Hal tersebut disembunyikan dari masyarakat secara umum untuk menghindari kesalahpahaman. Masalah akad nikah yang terpaksa dilaksanakan setelah resepsi pernikahan karena menyesuaikan habisnya masa idah dan pelaksanaan *tawki'l az zauj* dari Agus Kholiq kepada Faifsan Taufiq.

Namun di sisi lain ketidakpahaman masyarakat secara umum ini juga memberikan dampak positif. Sebagaimana kita tahu bahwa cukup banyak penduduk Indonesia yang bermukim di luar negeri. Baik karena alasan menempuh pendidikan, pekerjaan, menjadi tenaga kerja dan lain sebagainya. Justru ketika masyarakat kurang paham dengan hukum ini, maka tidak banyak

⁹ Ahmad Zainuri, Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, *wawancara*, Madiun, tanggal 15 Juni 2011

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 29 KOMPILASI HUKUM

ISLAM TENTANG KETENTUAN KEBOLEHAN SUAMI

MEWAKILKAN KABUL DALAM AKAD NIKAH DI KANTOR

URUSAN AGAMA KECAMATAN WUNGU

A. Analisis Pelaksanaan *Tawki'l az zauj* dalam Akad Nikah di KUA Kecamatan Wungu

Pelaksanaan *tawki'l az-zauj* di KUA Kecamatan Wungu merupakan kasus yang baru terjadi satu kali dalam kurun waktu mulai berdirinya instansi tersebut hingga saat ini. Adapun kasusnya sebagaimana tersebut di bab III yaitu antara Agus Kholiq yang mewakili kabul dalam akad nikah kepada Faifsan Taufiq dalam pernikahannya dengan Siti Masfufah.

Adapun kebolehan nya bukanlah hukum yang pada awalnya berupa larangan yang kemudian diperbolehkan karena adanya *ḍarurat*. Seperti contoh seseorang diperbolehkan makan bangkai ketika sama sekali tidak ada makanan dan dalam keadaan kelaparan. Kebolehan ini berdasarkan pada kaidah sebagai berikut:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

مَنْ صَحَّتْ مِنْهُ مُبَاشَرَةُ الشَّيْءِ : صَحَّ تَوَكُّلُهُ فِيهِ غَيْرُهُ ، وَتَوَكَّلُهُ فِيهِ عَنْ غَيْرِهِ

Seseorang yang sah melakukan sesuatu secara pribadi sah mewakili sesuatu tersebut kepada orang lain dan sah menjadi wakil dari orang lain.

Tawki'l az zauj yang terjadi di KUA kecamatan Wungu menurut macamnya merupakan *tawki'l muqayyad*. Dalam *tawki'l az-zauj* ini calon suami yaitu Agus Kholiq secara terbatas memberikan kuasa kepada adik laki-lakinya yakni Faifan Taufiq untuk menerima kabul atas pernikahannya dengan Siti Masfufah. *Tawki'l* yang diberikan secara terbatas ini dapat dilihat dari surat kuasa yang dibuat sebagai syarat pelaksanaan *tawki'l az-zauj* dalam akad nikah.

Berdasarkan tata cara mewakilkannya pelaksanaan *tawkil az-za'uj* dalam akad nikah di KUA kecamatan Wungu dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pihak wali dan calon suami. Imam Sarbini yang bertindak sebagai wali dari Siti

Masfufah mewakilkan kepada Tasrifan untuk mengucapkan ijab. Sedangkan di pihak calon suami Agus Kholiq mewakilkan kepada saudara laki-lakinya Faifsan Taufiq.

Adapun *šīgat* ijab yang digunakan adalah “saya nikah dan kawinkan Siti Masfufah binti Moh. Suhud dengan Agus Kholiq bin Mukti Wibowo dengan mas kawin lima puluh ribu rupiah”. Adapun *šīgat* kabul dari wakil suami adalah “Saya terima nikah dan kawinnya Siti Masfufah binti Moh Suhud bagi saudara laki-laki saya Agus Kholiq dengan mas kawin lima puluh ribu rupiah di bayar tunai”.

Sigat yang digunakan juga telah sesuai dengan ketentuan bahwa wakil harus secara jelas menyebutkan bahwa akad yang dilaksanakan adalah untuk saudaranya. Penyebutan bahwa kabul yang diucapkan adalah untuk saudaranya adalah syarat sah nikah, karena jika wakil tidak menyebutkannya maka nikah berlaku baginya. Misalnya jika ia mengucapkan kabul “saya terima nikah dan kawinnya Siti Masfufah binti Moh. Suhud dengan mas kawin lima puluh ribu rupiah di bayar tunai” tanpa menyebutkan “untuk saudaraku”.

Adakalanya muncul anggapan jika misalnya seorang calon suami berhalangan hadir pada waktu akad nikah tidak ada salahnya jika pelaksanaan akad nikah di percepat atau di akhirkkan dari rencana awal pernikahan. Hal ini dimaksudkan mengutamakan hadirnya calon suami waktu akad. Akan tetapi jika

melihat kasus *tawki' az-zauj* dalam akad nikah di KUA kecamatan Wungu hal ini sulit dilaksanakan.

Alasan pelaksanaan *tawki' az-zauj* dalam akad nikah di KUA kecamatan Wungu adalah karena mundurnya idah dari Siti Masfufah yang diperhitungkan jatuh sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan. Padahal sebelum sampai tanggal habisnya masa idah tersebut calon suami yaitu Agus Kholiq harus berangkat keluar negeri. Pada akhirnya diambil solusi mendahulukan resepsi pernikahan dan melaksanakan akad nikah dengan cara *tawki' az-zauj* dari Agus Kholiq kepada Faifsan Taufiq.

Apabila dipaksakan dengan maksud mengutamakan hadirnya calon suami dengan cara mempercepat akad nikah hal ini justru bertentangan dengan hukum Islam. Para Ulama telah sepakat bahwa menikahi perempuan yang masih dalam masa idah haram hukumnya. Sebagaimana juga di atur dalam Pasal 40 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan seorang wanita yang masih berada dalam masa idah dengan pria lain.”

B. Analisis Terhadap Implementasi Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam tentang Ketentuan Kebolehan Suami Mewakulkan Kabul dalam Akad Nikah Di KUA Kecamatan Wungu.

KUA sebagai instansi yang bertugas di bidang pencatatan pernikahan lebih banyak menggunakan aturan-aturan yang bersifat teknis pelaksanaan daripada Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam yang berupa aturan yang mengatur hukum Islam secara umum.

Kompilasi Hukum Islam di KUA berkedudukan sebagai pedoman atau landasan dalam hal ketentuan hukum Islam. Adapun peraturan di bawahnya seperti Peraturan Menteri Agama merupakan pedoman atau landasan KUA dalam hal ketentuan pelaksanaan tugas dan kewajiban KUA.

Jauh sebelum Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai ketentuan hukum suami mewakilkan kabul dalam akad nikah, Peraturan Menteri Agama juga telah mengatur hal tersebut. Peraturan inilah yang digunakan oleh KUA sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam. Peraturan tersebut adalah:

1. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam.
2. Pasal 24 PMA nomor 2 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Menteri Agama Republik Indonesia

1. Akad nikah harus dihadiri oleh calon suami.
2. Dalam hal calon suami tidak dapat hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain.
3. Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana berikut:
 - 1) Laki-laki;
 - 2) Beragama Islam;
 - 3) Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
 - 4) Berakal;
 - 5) Merdeka; dan
 - 6) Dapat berlaku adil.
 - b. Surat kuasa yang disahkan oleh PPN atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia apabila calon suami berada di luar negeri.

Pada pelaksanaan *tawkil zauj* dalam akad nikah di KUA kecamatan Wungu tidak diperlukan adanya pengesahan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Meskipun pada pelaksanaan akad nikah posisi suami berada di luar negeri akan tetapi sebelumnya telah memberikan kuasa kepada saudara laki-lakinya. Dalam pelaksanaannya surat kuasa yang digunakan di KUA tidak secara

jelas disahkan oleh PPN dengan bentuk legalisir. Akan tetapi dengan adanya pencantuman bahwa pelaksanaan *tawkil az-zauj* tersebut berdasarkan surat kuasa dalam formulir N, maka surat tersebut telah dianggap sah.

Pada prakteknya di Indonesia, mewakilkan atau menunjuk wakil, memberi kuasa selalu disyaratkan harus dalam bentuk tertulis. Dan lazimnya di dalam surat kuasa tersebut dikemukakan apa yang menjadi hak dan wewenang si penerima kuasa, dan penerima kuasa tidak boleh menyalahi atau berbuat menyimpang dari apa yang telah dikuasakan.

Dengan pemberian kuasa dalam bentuk tertulis ini, akan memperkecil kemungkinan penerima kuasa menyalahgunakan hak dan wewenang yang diberikan kepadanya, terutama sekali akan lebih jelas terlihat apakah si penerima kuasa telah melakukan perbuatan menyimpang dan merugikan pihak pemberi kuasa.

Mengenai penandatanganan taklik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan secara teknis diatur juga dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007. "Dalam hal suami mewakilkan kabulnya kepada orang lain, pembacaan dan penandatanganan taklik talak oleh suami, dilakukan pada waktu lain di hadapan PPN, Penghulu atau Pembantu PPN tempat akad nikah dilaksanakan".

Pegawai Pencatat Nikah hendaknya memperhatikan dengan seksama kelengkapan syarat tambahan seperti surat kuasa yang menjelaskan adanya perwakilan dari calon suami. Selain itu juga harus berhati-hati dalam

Terdapat pembahasan dalam Bab II bahwa calon suami dapat mewakilkan kabul dalam akad nikah ketika dalam keadaan belum dewasa sebagaimana dalam kitab *I'ānah at Ṭālibīn*. Pendapat ini tidak dapat dijadikan alasan seorang calon suami mewakilkan kabul dalam akad nikah di Indonesia. Sebagaimana kita tahu bahwa Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menentukan batas minimal calon mempelai laki-laki. Selain itu seorang anak kecil yang belum dewasa juga belum cakap hukum melaksanakan kewajibannya sendiri sehingga belum bisa untuk mewakilkan kepada orang lain.

Dalam hal ini peran aktif dari pegawai KUA sangat menentukan bagaimana ketentuan ini dilaksanakan. Meskipun tidak disebutkan secara rinci aturan suatu permasalahan baik dalam undang-undang, peraturan dan sebagainya pegawai KUA hendaknya terus menggali mengenai ketentuan hukum Islam yang semestinya.

Kompilasi Hukum Islam yang berkedudukan sebagai pedoman dalam hal hukum Islam, ketentuannya secara tidak langsung telah diimplementasikan dengan dilaksanakannya peraturan di bawahnya oleh KUA. Ketentuan pasal 29 yang mengatur kebolehan suami mewakilkan kabul dalam akad nikah sekaligus dilaksanakan ketika KUA menggunakan Peraturan Menteri Agama sebagai pedoman pelaksanaan. Baik dalam hal ketentuan mewakilkan, pencatatan nikah, serta penanda tangan taklik talak.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dirumuskan dari landasan teori dan hasil penelitian yang ada, penulis dapat menyimpulkan mengenai pelaksanaan *tawki' az-zauj* dalam akad nikah di KUA kecamatan Wungu adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *tawkīl az-zauij* dalam akad nikah di KUA Kecamatan Wungu diperbolehkan oleh hukum Islam, baik menurut pendapat para fukaha dan ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum pernikahan di Indonesia. Adapun pihak-pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan *tawkīl az-zauij* dalam akad nikah adalah antara Agus Kholiq yang mewakili kabul dalam akad nikah kepada Faifan Taufiq dalam pernikahannya dengan Siti Masfufah.

Pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat yang ada, oleh karenanya pernikahannya dapat dicatat oleh KUA Kecamatan Wungu sebagai pernikahan yang sah. Prosedur pelaksanaannya sebagaimana ketentuan pencatatan pernikahan secara administratif. Adapun perbedaannya dalam pembuatan surat kuasa oleh calon suami bahwa akad nikah yang diucapkan wakil adalah untuknya, ucapan kabul yang dilafazkan wakil suami dan penandatanganan taklik talak diserahkan kepada suami.

B. Saran

Pernikahan yang dilaksanakan dengan cara suami mewakili kabul dalam akad nikah hendaknya dilaksanakan dengan hati-hati. Yaitu dalam hal prosedur pelaksanaannya seperti pembuatan surat kuasa, pengucapan kabul oleh wakil dari suami serta penandatanganan taklik talak. Hal ini dikarenakan ketentuannya tidak biasa khususnya dalam hal pengucapan kabul akad nikah oleh wakil dari suami. Sehingga tidak menimbulkan kesalahan hukum yang mengakibatkan pernikahan sah bagi wakil dari suami dan mengurangi makna sakralnya akad nikah.

- al, Māwardi, Abi al-Hasan ‘Ali bin Muḥammad bin Ḥabib al-Māwardi al-Busyairi, *Al-Hāwī al-Kabīr*, Juz 9, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2009.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- asy, Syarbiniy, Syamsu ad-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khātib, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma‘rifati Ma‘āni al-Alfāz al-Minhāj*, Juz 4, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1994.
- asy, Syawkaniy, Muḥammad bin ‘Ali, *Fath al Qadir*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, tt.
- Chairuman Lubis, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ibnu ‘Ābidīn, *Rad al-Mukhtār*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, tt.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, tt.
- Ibrāhīm bin Muḥammad bin Salīm Ibnu Ḍauyān, *Manār as-Sabīl*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, tt.
- M. Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Moh. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Muḥammad asy-Syamma‘, *al-Mufid fi al-abḥās fi al-aḥkām az-zawāj wa at-ṭalāq wa al-mīrās*, Beirut: ad-Dār asy-Syammiyyah: 1995.
- Muḥammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* Yogyakarta: Elsa Press, Cet V , 2008.
- Muhjab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 2, Beirut: Dār al-Fath, 2006.

Totok Jumanoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005.

Wahbah az-Zuhailiy, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Juz 4, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

Nanang Husni Faruk, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal-29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam KHI Tentang Qabul Nikah Yang Diwakilkan*, skripsi tahun 2008, IAIN Wali Songo Semarang.

Muh.Abd.Wahid, *Korelasi Ketentuan Hukum dalam Pasal-29 Kompilasi Hukum Islam dengan kitab acuannya tentang mewakilkan ucapan qabūl akad nikah kepada pria lain*, skripsi tahun 2000, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*.

Direktorat Jenderal-Bimbingan Islam Kementrian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, 2010.

Hilmy Nugraha, *Misaqan Galīzan*, dalam <http://menjadihilmy.blogspot.com/2009/12/mitsaqan-ghalidza.html>, 07 Juni 2011.